



Kabar

RBP SULAWESI TENGAH

Edisi *Pertama*

Berhasil Jaga Hutan,
Sulawesi Tengah Dapat
Dana Insentif Sebesar 2,8
Juta Dolar AS



Pemprov dan
KEMITRAAN Susun
Panduan Program RBP
Sulteng

Menjaga Durian
Lalundu Melalui
Rehabilitasi
Hutan Desa

PENGANTAR

Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menjadi provinsi kelima yang mendapatkan insentif dana karbon sebesar 2,8 juta USD bagian dari skema *Result Based Payment Green Climate Fund* (RBP-GCF). Dana tersebut menjadi peluang bagi Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperkuat tata kelola kehutanan, memastikan perlindungan terhadap keberadaan 4,27 juta Ha serta merehabilitasi hutan yang rusak akibat aktivitas ilegal.

Dalam pelaksanaannya, KEMITRAAN mendapatkan kepercayaan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengawal dan bekerjasama dengan Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup serta Bappeda selaku penerima manfaat langsung dari dana RBP dalam menjalankan program pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui perbaikan tata kelola hutan lestari, peningkatan resiliensi, dan penghidupan masyarakat yang berkelanjutan.

Kegiatan pada Dinas Kehutanan selaku penerima 70% dari total dana 2,8 Juta USD akan fokus pada penguatan unit UPT KPH dan Tahura yang lokasinya tersebar di 13 Kabupaten dan 1 Kota se-Sulawesi Tengah. Patroli hutan merupakan salah satu kegiatan utama, tujuannya untuk menekan tindak kejahatan yang merusak hutan dan berpotensi menghasilkan produksi emisi karbon.

Sementara di Dinas Lingkungan Hidup, kegiatan utamanya ada pada pembentukan 20 Program Kampung Iklim (Proklim) baru. Upaya ini untuk mendukung target pemerintah Provinsi yang ingin mencapai pembentukan 500 Proklim serta 20.000 Proklim secara nasional.

Sementara Bappeda akan memusatkan kegiatan-kegiatannya pada penguatan regulasi serta melakukan kajian strategis seperti pengkajian ulang inventarisasi gas rumah kaca (GRK), penyusunan rencana aksi mitigasi yang terarah, pengembangan kebijakan dan peraturan yang mendukung, serta peningkatan kapasitas kelembagaan, termasuk perubahan paradigma kerja sesuai dengan Surat Edaran Dirjen PPI No. 1 Tahun 2024.

Sebagai organisasi independen yang mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, KEMITRAAN tidak hanya akan fokus memastikan aktivitas yang dilakukan berkualitas, melainkan juga akan mengarusutamakan prinsip *governance* dalam setiap prosesnya, seperti partisipasi multipihak, transparansi serta akuntabilitas program.





Berhasil Jaga Hutan, Sulawesi Tengah Dapat Dana Insentif Sebesar 2,8 Juta Dolar AS

Pada tanggal 17 Desember 2024 Gubernur Sulawesi Tengah meluncurkan program pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui perbaikan tata kelola hutan lestari, peningkatan resiliensi dan penghidupan masyarakat yang berkelanjutan. Dana tersebut merupakan bagian dari skema program *Result Based Payment Green Climate Fund* (RBP – GCF) yang diterima oleh Pemerintah Indonesia karena telah berhasil menurunkan produksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) tahun 2024 – 2026.

Dalam sambutannya, Gubernur Rusdy Mastura yang didampingi oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Neng, S.T.,M.M., menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan BPD LH, atas alokasi anggaran sebesar 2,8 juta dollar AS yang diberikan kepada Sulawesi Tengah sebagai insentif atas keberhasilannya melindungi kawasan hutan seluas 4,27 juta hektar.

“Program ini bukan hanya solusi untuk pembangunan berkelanjutan, tetapi juga langkah

konkret mitigasi perubahan iklim dan bencana. Ini sekaligus menjadi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya berharap semua pihak serius dan bersinergi dalam menyukseskan program ini. Kesadaran akan pentingnya menjaga alam harus menjadi prioritas kita bersama. Melibatkan masyarakat lokal tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memastikan kesejahteraan mereka terjaga,” sebutnya.

Selain itu Direktur Utama BPD LH, Joko Tri Haryono dalam sambutannya menyampaikan bahwa dana insentif ini adalah bentuk dukungan global atas komitmen Sulawesi Tengah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca, sehingga penting menggunakan dana tersebut secara efisien dan efektif.

“Dana ini bukan akhir, melainkan awal dari upaya yang lebih besar untuk mendorong pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Kami melihat Sulawesi Tengah memiliki inisiatif dan kontribusi yang signifikan di sektor kehutanan dan lahannya,” ungkapnya.

Hasbi Berliani, Direktur Program KEMITRAAN, menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Pemprov Sulawesi Tengah, KLHK, dan BPD LH atas kepercayaan yang diberikan kepada KEMITRAAN sebagai Lembaga Perantara (Lemtara) untuk mengelola pelaksanaan program RBP REDD+.

“Kami mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada KEMITRAAN. Kami juga berharap dukungan penuh dari pokja RBP REDD+, dinas terkait, akademisi, media, dan organisasi masyarakat sipil di Sulawesi Tengah,” ucap Hasbi.

Kegiatan ini dihadiri sebanyak 90 orang perwakilan dari Sekretariat Daerah, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, KPH dan Tahura, Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, Balai PPI, BPD LH, BMKG Sulteng, Gakkum, Akademisi, CSO Lokal dan Media.



**Selangkah
lagi untuk
mendapatkan
informasi lengkap**



Scan QR code ini dan baca
publikasinya sekarang!



Luncurkan Program RBP
GCF REDD+, Gubernur
Sulteng : Upaya
Pengurangan Emisi
dari Deforestasi dan
Degradasi Hutan



Gubernur Sulteng
Resmikan *Kick
Off* Program RBP
GCF untuk Mitigasi
Perubahan Iklim



Sulawesi Tengah Dapat
Alokasi Anggaran USD
2,8 Juta Untuk Insentif
RBP REDD+



Pemprov dan KEMITRAAN Susun Panduan Program RBP Sulteng

KEMITRAAN dan Pemerintah Provinsi membentuk tim project management unit untuk memastikan program mencapai tujuan serta menyusun dokumen Project Operation Manual (POM) yang sedikitnya mengatur mulai dari tata kelola program hingga mekanisme pengadaan serta pelaksanaan *safeguard* bidang lingkungan dan sosial.

Dalam sambutannya, Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Dinas Kehutanan Ir.Susanto Wibowo, S.Hut.,M. Si.,IPU menjelaskan beberapa poin yang penting untuk. Diperhatikan di antaranya; penyusunan dokumen POM dilakukan secara komprehensif, agar tidak terjadi kepincangan dalam pelaksanaan program (mulai dari tata kelola, pengelolaan keuangan hingga monitoring dan evaluasi.

Beliau juga menyebut pentingnya sinergi antar pihak serta transparansi dalam pemanfaatan dana program karena diauditoleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Sinergilitas dan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, masyarakat maupun lembaga-lembaga swadaya termasuk perguruan tinggi serta dana diawasi dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan yaitu menanggulangi kerusakan lingkungan, pesannya secara lengkap.

Kegiatan dihadiri oleh 47 orang perwakilan dari UPT Dinas Kehutanan, KPH, Tahura, Dinas Lingkungan Hidup dan Bappeda. Keterlibatan mereka diharapkan mampu merumuskan dan menyepakati mekanisme

bersama untuk dijadikan sebagai panduan dalam pelaksanaan program RBP GCF REDD+.

Di sesi diskusi, materi terkait disampaikan oleh perwakilan KEMITRAAN Jakarta. Materi terkait tata kelola pelaksanaan program dan pengawasan program disampaikan oleh Hasbi Berliani selaku Direktur Program. Sementara pengelolaan keuangan dan pelaporan disampaikan oleh Budi Setyawan, Manager Keuangan, serta Zulfadli yang menjelaskan terkait kebijakan dan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Terakhir, materi terkait safeguard bidang lingkungan dan sosial disampaikan oleh Inda Loekman.

Dalam proses diskusi, Ir. Nurudin, SP., IPU KPH Pulau Peling menyampaikan tentang

pentingnya skema Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) dalam pelaksanaan program baik itu di dalam maupun di luar kawasan hutan.

“Jangan karena di dalam kawasan hutan kita tidak menghargai pendapat masyarakat,” tegasnya.

Beliau juga menyebut bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah memiliki dokumen Project Implementing Manual (PIM) yang dapat menjadi referensi penyusunan POM.

“Dokumen ini kami susun sebagai panduan dalam program RBP REDD+ Sulteng, untuk menjaga akuntabilitas dan memastikan program di Dinas Lingkungan Hidup bisa tercapai,” ungkapnya.





Upaya Serius Menanggulangi Kejahatan Hutan di Sulawesi Tengah.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Tahura di Sulawesi Tengah melakukan patroli penyelidikan dan pengambilan data terhadap kegiatan pembukaan lahan, illegal logging dan pertambangan liar di dalam kawasan hutan.

Patroli yang dilakukan oleh KPH dan Tahura berhasil mengidentifikasi 5 kasus illegal logging, 12 kasus perambahan, 1 kasus tumpang tindih dengan izin perkebunan sawit dan 3 kasus pertambangan ilegal yang berada di dalam kawasan hutan.

Sebagai tindak lanjut dari patroli, banyak inisiatif kolaborasi terjalin antara pemerintah dengan masyarakat di masing – masing daerah. Misalnya pemerintah serta masyarakat Desa Bangga berkolaborasi dengan KPH Kulawi melakukan penyitaan terhadap temuan 31 batang kayu dan hasil hutan yang dipanen tanpa pemilik, serta pembangunan pos penjagaan di titik tempat keluarnya kayu.

Sedangkan sosialisasi yang dilakukan oleh KPH

Dolaggo Tanggung berhasil mengaktivasi kegiatan ronda malam di Desa Labuan untuk mencegah pengangkutan kayu dari hutan di malam hari.

Selain itu, KPH melakukan sosialisasi kepada para pengusaha kayu agar tidak membeli kayu tidak berizin. Hal ini dilakukan oleh KPH Balantak, KPH Tepe Asa Maroso dan KPH Tepe Asa Aroa kepada Perusahaan untuk memastikan kayu yang diperoleh berasal dari pihak memiliki izin Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) legalitas kayu.

Pada kasus perambahan hutan, pengajuan skema Perhutanan Sosial ditawarkan oleh KPH Sivia Patuju kepada 33 orang kelompok masyarakat Desa Uwekuli yang terlanjur mengelola kawasan hutan seluas 66 Ha. KPH Sivia Patuju juga menghentikan aktivitas pembangunan jalan produksi di dalam kawasan untuk mencegah perambahan tidak meluas.

Sementara itu, praktik kasus jual beli lahan di kawasan hutan di Desa Pantolobete dicegah

oleh KPH Banawa Lalundu melalui pengusulan wilayah adat serta pengelolaan agroforestry kepada masyarakat Suku Tado. KPH yang sama juga menggandeng divisi Patroli LPHD Tinauka Bangkit untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang menanam sawit di areal kawasan hutan.

Terkait kasus pelanggaran yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan ilegal di Sungai Tabong, Hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Buol, KPH Pogogul melakukan penyitaan terhadap peralatan penambangan emas, seperti kendaraan jenis

hardtop, mesin diesel beserta selang dan pipa keong penyedot air, serta akses jalan yang di bangun dengan menggunakan unit alat berat Exavator.

KPH Pogogul juga melakukan sosialisasi kepada pemerintah dan masyarakat Desa Kokobuka, untuk sama – sama melakukan pencegahan terhadap aktivitas pertambangan ilegal serta berkolaborasi dengan KPH Gunung Dako untuk melakukan patroli bersama mengingat lokasi tersebut berada di perbatasan Kabupaten Buol dan Toli – Toli.

Kasus	Jumlah	Temuan	Pencegahan
Illegal Logging	5	110 batang kayu	Membangun pos dan pelibatan masyarakat dan pemerintah dalam pengawasan
Perambahan Hutan	12	450 ha	Perhutanan sosial HD/HKM/HA
Tambang Emas	2	Peralatan	Penyitaan alat dan kolaborasi dengan masyarakat
Tambang Nikel	1	Peralatan	-
Tambang Gamping	2	Peralatan manual	Sosialisasi kepada pelaku dan pemerintah desa



Membangun Ketahanan Kepada 20 Desa Rentan Perubahan Iklim di Sulawesi Tengah



Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah melakukan penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim kepada 20 Desa rentan berdasarkan data SIDIK Dinas Lingkungan Hidup yang di 13 Kabupaten/Kota serta CSO lokal yang fokus pada isu perubahan iklim.

Dalam pembukaanya, Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Wahid Irawan, S.STP, menyebut kegiatan ini bertujuan untuk; (1) Meningkatkan pemahaman masyarakat dan para pihak tentang perubahan iklim, pemicu dan dampak negatif yang ditimbulkan; (2) menggali masukan dan saran dalam pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di level tapak serta; (3) meningkatkan kapasitas peserta tentang penggunaan SIGN – SMART GRK dalam pelaksanaan Inventarisasi GRK Kab/Kota.

“Inisiatif pelaksanaan kegiatan ini merupakan langkah awal untuk mendorong 20 desa di Kab/ Kota Sulawesi Tengah menjadi desa proklum baru, mengingat intensitas dan *magnitude* perubahan

iklim telah memiliki dampak negatif yang semakin nyata. Sehingga diharapkan terjadi peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat terhadap Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (MAPI) yang selama ini masih kurang,” harapannya.

Dampak perubahan iklim juga menimbulkan bencana dan ancaman yang mengganggu pembangunan desa seperti banjir, longsor, kekeringan, angin kencang, gelombang tinggi. Hal ini berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat di sektor pertanian dan laut hampir di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.

Hadir menjadi narasumber dalam kegiatan yang digelar selama dua hari antara lain Direktur Mitigasi Perubahan Iklim KLH/BPLH RI, Irawan Asaad, P.hD yang menyampaikan materi tentang kebijakan dan strategi pengendalian perubahan iklim. Sementara perwakilan dari BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah, Joice Evelyn Ariesabeth, S.IK., M.Si menerangkan seputar kebijakan Provinsi Sulawesi Tengah terkait mitigasi perubahan iklim.

Dari sisi masyarakat sipil, DR. Abdul Rauf, M.Si dari Universitas Tadulako memberikan materi seputar pemetaan tantangan serta potensi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak, serta Azmi Sirahuddin dari Yayasan Eknesia membagi pengalaman melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak.

Di hari terakhir kegiatan Sukyati ST.,M.Si dari Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah menjelaskan materi seputar pengenalan dan penggunaan aplikasi SIGN SMART KLH sekaligus memandu agar masyarakat dan DLH Kab/Kota dapat secara mandiri melakukan inventarisasi GRK. Selanjutnya, DLH Kab/Kota akan melakukan pengenalan dan penggunaan Aplikasi SIGN SMART KLH melalui sosialisasi di tingkat desa dan kabupaten/kota.



**Selangkah
lagi untuk
mendapatkan
informasi
lengkap**

Scan QR code
ini dan baca
publikasinya
sekarang!



DLH Sulteng dan
Kemitraan Perkuat
Strategi Iklim Berbasis
Komunitas bagi 20 Desa
Sulteng



DLH Sulteng dan
Kemitraan Perkuat Aksi
Iklim di 20 Desa Rentan



DLH Sulteng dan
Kemitraan Dorong Aksi
Iklim di Tingkat Tapak



DLH Sulteng dan
Kemitraan Dorong
Aksi Konkret Hadapi
Perubahan Iklim

Perbaikan Data Dinas Kehutanan Melalui Pelatihan Drone

Dalam rangka penguatan tata kelola hutan yang baik, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah melalui dukungan program RBP GCF REDD+ yang dikelola oleh KEMITRAAN, mengadakan pelatihan uji kompetensi dan sertifikasi pengoperasian drone yang diikuti oleh 22 orang peserta perwakilan dari staf Dinas Kehutanan, UPT KPH dan Tahura.

Muhammad Neng, S.T., M.M., Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dalam sambutannya yang disampaikan, secara daring berharap kegiatan ini dapat melahirkan para pilot drone yang kompeten dan tersertifikasi, baik dari lingkup Dinas Kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan, maupun UPT Tahura.

“Kompetensi ini sangat penting agar pengumpulan dan pemanfaatan data spasial dapat dilakukan secara profesional, akuntabel dan berdaya guna,” jelasnya.

Adapun penguatan tata kelola hutan di Sulawesi Tengah penting dilakukan untuk semakin memperkuat transformasi perhutanan sosial, mengingat kehadiran data yang akurat menjadi fondasi penting dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.

Keberadaan para pilot drone di lingkungan Pemerintah Provinsi juga bagian dari upaya Pengurangan emisi GRK melalui perbaikan tata kelola hutan lestari, peningkatan resiliensi dan penghidupan masyarakat yang berkelanjutan di Sulawesi Tengah.

Narasumber dan instruktur kegiatan ini berasal dari Dinas Kehutanan, Kementerian Perhubungan serta Asosiasi Pilot Drone Indonesia yang langsung memberikan sertifikasi pilot drone kepada peserta yang dinyatakan lulus.

Peserta pelatihan, Rahmat dari KPH Sintuvu Maroso merasa peningkatan kapasitas yang di dapat selama pelatihan akan banyak membantu kerja – kerjanya, terutama dalam mendeteksi kebakaran hutan.

“Pelatihan uji kompetensi dan sertifikasi pengoperasian drone ini membantu mendukung kami dalam memantau kebakaran hutan, mendeteksi titik-titik api lewat pemantauan udara untuk memudahkan mengendalikan kebakaran secara cepat,” terangnya dalam penuh semangat



Menjaga Durian Lalundu Melalui Rehabilitasi Hutan Desa



Desa Tinauka, Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala dikenal sebagai salah satu sentra penghasil durian Lalundu khas Sulawesi Tengah. Durian Lalundu dikenal dengan rasanya yang manis dengan sedikit rasa pahit, tekstur lembut dan legit menjadikannya banyak digemari tidak hanya oleh masyarakat sekitar melainkan hingga di ekspor ke Kalimantan dan wilayah lain di Indonesia.

Pohon durian lalundu banyak tumbuh di dalam kawasan hutan desa yang dikelola oleh Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) Tinaukan Bangkit yang diketuai oleh tokoh adat Suku Tado, Zainudin S. Surapalu.

Selain durian, hutan desa yang mereka jaga juga menghasilkan hutan non kayu lainnya seperti alpukat, manggis dan padi ladang. Keberadaan hutan tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh kelompok LPHD tetapi juga oleh masyarakat Desa Tinauka dan sekitarnya.

Hutan Desa Tinauka, merupakan urat nadi kehidupan bagi masyarakat Suku Tado yang

menyediakan sumber pangan melimpah di dalamnya. Selain itu, hutan diyakini sebagai tempat pelindung dari ancaman marabahaya seperti bencana, kelaparan dan perang.

Kondisi ini berubah saat ada oknum – oknum dengan dukungan dari kelompok kuat melakukan praktik jual beli lahan tanpa sepengetahuan pemerintah dan kelompok LPHD. Akibatnya, wilayah hutan desa yang selama ini dilindungi dan dikelola dengan baik mengalami kerusakan karena pembukaan lahan skala luas untuk ditanami sawit.

Akibatnya ketika musim hujan, banjir melanda pemukiman warga, longsor di badan sungai memengaruhi kualitas air. Lahan padi ladang yang ditanam oleh Suku Tado berkurang dan mengurangi kebutuhan pangan di Desa Tinauka yang selama ini didapat secara mudah.

Sejak bulan Maret 2025 hingga saat ini, KPH Banawa Lalundu mulai intens melakukan patroli lapangan di Desa Tinauka dengan menyisir wilayah pembukaan lahan. Polisi hutan (Polhut)

memberikan peringatan langsung kepada oknum pemilik lahan terkait dengan penanaman sawit dan pembelian lahan merupakan tindakan ilegal, karena berada di dalam kawasan hutan desa.

“Jika memperluas lahan dan tidak menghentikan penanaman sawit maka kami tidak segan – segan untuk mengambil tindakan penangkapan,” ujar kepala Polhut KPH Banawa Lalundu.

Tidak tinggal diam, Zainudin beserta kelompok LPHD Tinauka Bangkit telah secara aktif melaporkan satu kasus pembukaan jalan di dalam lokasi hutan desa. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan semakin merusak hutan desa, mengingat keberadaan jalan semakin memudahkan akses ke dalam hutan. Sebagai tindak lanjut dari laporan, Gakkum dan Polhut KPH Banawa Lalundu melakukan penangkapan dan penyitaan alat berat yang digunakan untuk membuka lahan.

Divisi patroli LPHD Tinauka Bangkit, telah menjadwalkan patroli rutin setiap bulan sekali berkolaborasi dengan KPH Banawa Lalundu. Kegiatan ini didukung oleh pemerintah desa melalui penyediaan sarana prasarana seperti kendaraan roda dua dan bahan bakar.

Selama ini Pak Zainudin telah melakukan sosialisasi pentingnya perlindungan hutan dalam rapat – rapat di desa. Bersama pemerintah desa, ia dan kelompoknya juga aktif meminta bantuan bibit tanaman produktif ke pihak – pihak terkait untuk melakukan rehabilitasi wilayah hutan desa yang mengalami kerusakan.

“Dengan dukungan kegiatan KPH Banawa Lalundu yang membantu kita melakukan pengamanan kawasan dan peningkatan nilai ekonomi perhutanan sosial, kita bisa menjadi sejahtera dan kawasan tetap lestari dan kita aman dari bencana alam”, tutupnya.



Kabar RBP SULAWESI TENGAH

